

EDISI : Kamis, 14 Maret 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Pandora*

Gubernur Koster Minta Lahan Lokasi Bandara di Kubutambahan Diidentifikasi



Tanah duwe Desa Pakraman Kubutambahan, Buleleng yang rencananya dijadikan lokasi bandara.

SINGARAJA, NusaBali

Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta Pemkab Buleleng mengidentifikasi lahan yang bakal dijadikan lokasi Bandara Interna-

sional Buleleng di kawasan Bukit Teletubbies, Desa/Kecamatan Kubutambahan. Identifikasi tersebut hanya memastikan koordinat posisi lahan.

Informasi di lapangan, surat permintaan identifikasi lahan rencana pembangunan bandara tersebut

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Gubernur Koster Minta Lahan Lokasi Bandara di Kubutambahan...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sudah dilayangkan Gubernur Koster kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, 22 Februari 2019 lalu. Dalam surat itu, Gubernur Koster intinya meminta data tanah lokasi proyek bandara yang ada di Desa Kubutambahan. Data dimaksud menyangkut letak, luas, penguasaan fisik tanah, dan status tanah.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pun telah menindaklanjuti surat Gubernur Koster tersebut, dengan memohon bantuan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng untuk mengidentifikasi lahan lokasi bandara di wilayah Desa Kubutambahan. Betulukah?

Ditemui NusaBali se usai menghadiri sidang paripurna DPRD Buleleng di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Senin (11/3), Bupati Agus Suradnyana membenarkan pihaknya diminta Gubernur Koster untuk menelusuri data tanah yang akan dijadikan lokasi bandara. Bupati Agus Suradnyana mengatakan, surat tersebut diterima sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, Kamis (7/3) lalu. Pihaknya pun telah menindaklanjuti surat Gubernur Koster dengan meminta BPN Buleleng menelusuri data tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara.

"Kalau tidak salah, suratnya masuk ke saya sebelum Nyepi. Setelah libur Nyepi, saya sudah teruskan ke BPN untuk men-

elusuri keberadaan tanah di sana (Kubutambahan, Red). Bagaimana hasilnya, kita masih tunggu," jelas Agus Suradnyana.

Menurut Agus Suradnyana, mencermati surat Gubernur Bali yang diterimanya, penelusuran (identifikasi lahan) dilakukan untuk mengetahui kepastian luas tanah yang ada sekarang. Selain itu, juga koordinat dan batas-batas penyanggah-nya juga perlu diketahui dengan pasti. Data yuridis ini nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Koster melalui surat jawaban.

"Perkembangan yang terbaru hanya itu, kami diminta mencari tahu di mana letak koordinat tanahnya, lintang berapa, siapa di sebelahnya (penyanggah, Red)? Kalau datanya sudah terkumpul, kami akan langsung menjawab surat Gubernur tersebut," tegas Bupati asal Desa Banyuwatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala BPN Buleleng, I Gusti Ngurah Pariatna Jaya, mengaku hingga saat ini belum menerima surat dari Pemkab Buleleng, terkait dengan rencana identifikasi lahan lokasi bandara di Desa Kubutambahan tersebut. Meski demikian, pihaknya akan menindaklanjuti jika surat permohonan tersebut sudah diterima. "Kami belum terima suratnya, belum bisa menjelaskan. Nanti kalau ada suratnya, kami tindaklanjuti," ujar Pariatna Jaya saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di

Singaraja, Rabu kemarin.

Untuk diketahui, Desa Pakraman Kubutambahan memiliki lahan duwen Pura Desa seluas 425 hektare, yang berlokasi di dua banjar adat, masing-masing Banjar Adat Kubuanyar dan Banjar Adat Tukad Ampel. Dari total lahan adat tersebut, seluas 370 hektare disewakan kepada PT Pinang Propertindo yang beralamat di Jakarta dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), sejak tahun 1991 silam.

PT Pinang Propertindo mengontrak dengan sewa sebesar Rp 300 per meter persegi, selama 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Konon, PT Pinang Propertindo rencananya membangun sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti hotel dan lapangan golf, di lahan tersebut. Namun, sejak dikontrak hingga saat ini tidak ada aktivitas apa pun. PT Pinang Propertindo kemudian memperpanjang kontrak hingga 3 kali sampai tahun 2026.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea, menyebutkan ada beberapa alasan mengapa lahan duwen Pura Desa itu dikontrakkan kepada pihak ketiga selama 90 tahun. Pertama, lahan milik adat itu sebagian besar termasuk seluas 370 hektare, merupakan lahan kering dan kurang produktif, sehingga tidak banyak memberikan pemasukan/pendapatan bagi adat. Di sisi lain, tanggungan adat untuk pembangunan pura dan pelaksanaan upacara cukup tinggi.

"Selama ini, krama adat memang tidak pernah dibebani peturunan (iuran untuk biaya upacara, Red), karena memiliki tanah duwen pura yang luas. Tetapi, karena hasilnya tidak mencukupi lantaran lahan kurang produktif, sehingga tanah adat itu dikontrakkan. Jadi, sewanya itu dipakai membiayai pelaksanaan upacara termasuk perbaikan pura," terang Jero Pasek Warkadea.

Selain menyangkut dana, Jero Pasek Warkadea juga mengakui dalam sewa kontrak itu ada kewajiban bagi PT Pinang Propertindo untuk membuat sertifikat lahan milik adat. Saat ini, semua lahan adat seluas 425 hektare sudah bersertifikat, baik HGB maupun sertifikat hak milik atas nama Desa Pakraman Kubutambahan.

"Kalau tidak ada sewa kontrak itu, mungkin saja tanah adat tersebut tidak punya sertifikat. Sekarang semuanya sudah ada sertifikatnya," ungkap tokoh adat yang kini masih menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Buleleng ini.

Di samping membuat sertifikat, PT Pinang Propertindo juga memberikan keleluasaan bagi warga stempat untuk mengolah lahan seluas 370 hektare. Hasil dari tanaman sebagian juga diserahkan kepada adat. "Warga kami juga diberikan mengolah lahan itu. Warga berkewajiban menyertorkan sebagian hasilnya ke adat. Cuma, lahan itu bisa ditanami ketika musim hujan. Kalau musim kemarau, lahannya kering," imbuhnya. **k19**

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Bandara*

Gubernur Koster Minta Lahan Lokasi Bandara di Kubutambahan Diidentifikasi



Tanah duwe Desa Pakraman Kubutambahan, Buleleng yang rencananya dijadikan lokasi bandara.

SINGARAJA, NusaBali

Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta Pemkab Buleleng mengidentifikasi lahan yang bakal dijadikan lokasi Bandara Interna-

sional Buleleng di kawasan Bukit Teletubbies, Desa/Kecamatan Kubutambahan. Identifikasi tersebut hanya memastikan koordinat posisi lahan.

Informasi di lapangan, surat permintaan identifikasi lahan rencana pembangunan bandara tersebut

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Gubernur Koster Minta Lahan Lokasi Bandara di Kubutambahan...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sudah dilayangkan Gubernur Koster kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, 22 Februari 2019 lalu. Dalam surat itu, Gubernur Koster intinya meminta data tanah lokasi proyek bandara yang ada di Desa Kubutambahan. Data dimaksud menyangkut letak, luas, penguasaan fisik tanah, dan status tanah.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pun telah menindaklanjuti surat Gubernur Koster tersebut, dengan memohon bantuan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng untuk mengidentifikasi lahan lokasi bandara di wilayah Desa Kubutambahan. Betulkah?

Ditemui NusaBali seusai menghadiri sidang paripurna DPRD Buleleng di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Senin (11/3). Bupati Agus Suradnyana membenarkan pihaknya diminta Gubernur Koster untuk menelusuri data tanah yang akan dijadikan lokasi bandara. Bupati Agus Suradnyana mengatakan, surat tersebut diterima sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, Kamis (7/3) lalu. Pihaknya pun telah menindaklanjuti surat Gubernur Koster dengan meminta BPN Buleleng menelusuri data tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara.

"Kalau tidak salah, suratnya masuk ke saya sebelum Nyepi. Setelah libur Nyepi, saya sudah teruskan ke BPN untuk men-

elusuri keberadaan tanah di sana (Kubutambahan, Red). Bagaimana hasilnya, kita masih tunggu," jelas Agus Suradnyana.

Menurut Agus Suradnyana, mencermati surat Gubernur Bali yang diterimanya, penelusuran (identifikasi lahan) dilakukan untuk mengetahui kepastian luas tanah yang ada sekarang. Selain itu, juga koordinat dan batas-batas penyanding-nya juga perlu diketahui dengan pasti. Data yuridis ini nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Koster melalui surat jawaban.

"Perkembangan yang terbaru hanya itu, kami diminta mencari tahu di mana letak koordinat tanahnya, lintang berapa, siapa di sebelahnya (penyanding, Red)? Kalau datanya sudah terkumpul, kami akan langsung menjawab surat Gubernur tersebut," tegas Bupati asal Desa Banyuwatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala BPN Buleleng, I Gusti Ngurah Pariatna Jaya, mengaku hingga saat ini belum menerima surat dari Pemkab Buleleng, terkait dengan rencana identifikasi lahan lokasi bandara di Desa Kubutambahan tersebut. Meski demikian, pihaknya akan menindaklanjuti jika surat permohonan tersebut sudah diterima. "Kami belum terima suratnya, belum bisa menjelaskan. Nanti kalau ada suratnya, kami tindaklanjuti," ujar Pariatna Jaya saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di

Singaraja, Rabu kemarin.

Untuk diketahui, Desa Pakraman Kubutambahan memiliki lahan duwen Pura Desa seluas 425 hektare, yang berlokasi di dua banjar adat, masing-masing Banjar Adat Kubuanyar dan Banjar Adat Tukad Ampel. Dari total lahan adat tersebut, seluas 370 hektare disewakan kepada PT Pinang Propertindo yang beralamat di Jakarta dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), sejak tahun 1991 silam.

PT Pinang Propertindo mengontrak dengan sewa sebesar Rp 300 per meter persegi, selama 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Konon, PT Pinang Propertindo rencananya membangun sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti hotel dan lapangan golf, di lahan tersebut. Namun, sejak dikontrak hingga saat ini tidak ada aktivitas apa pun. PT Pinang Propertindo kemudian memperpanjang kontrak hingga 3 kali sampai tahun 2026.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea, menyebutkan ada beberapa alasan mengapa lahan duwen Pura Desa itu dikontrakkan kepada pihak ketiga selama 90 tahun. Pertama, lahan milik adat itu sebagian besar termasuk seluas 370 hektare, merupakan lahan kering dan kurang produktif, sehingga tidak banyak memberikan pemasukan/pendapatan bagi adat. Di sisi lain, tanggungan adat untuk pembangunan pura dan pelaksanaan upacara cukup tinggi.

"Selama ini, krama adat memang tidak pernah dibebani peturunan (iuran untuk biaya upacara, Red), karena memiliki tanah duwen pura yang luas. Tetapi, karena hasilnya tidak mencukupi lantaran lahan kurang produktif, sehingga tanah adat itu dikontrakkan. Jadi, sewanya itu dipakai membiayai pelaksanaan upacara termasuk perbaikan pura," terang Jero Pasek Warkadea.

Selain menyangkut dana, Jero Pasek Warkadea juga mengakui dalam sewa kontrak itu ada kewajiban bagi PT Pinang Propertindo untuk membuat sertifikat lahan milik adat. Saat ini, semua lahan adat seluas 425 hektare sudah bersertifikat, baik HGB maupun sertifikat hak milik atas nama Desa Pakraman Kubutambahan.

"Kalau tidak ada sewa kontrak itu, mungkin saja tanah adat tersebut tidak punya sertifikat. Sekarang semuanya sudah ada sertifikatnya," ungkap tokoh adat yang kini masih menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Buleleng ini.

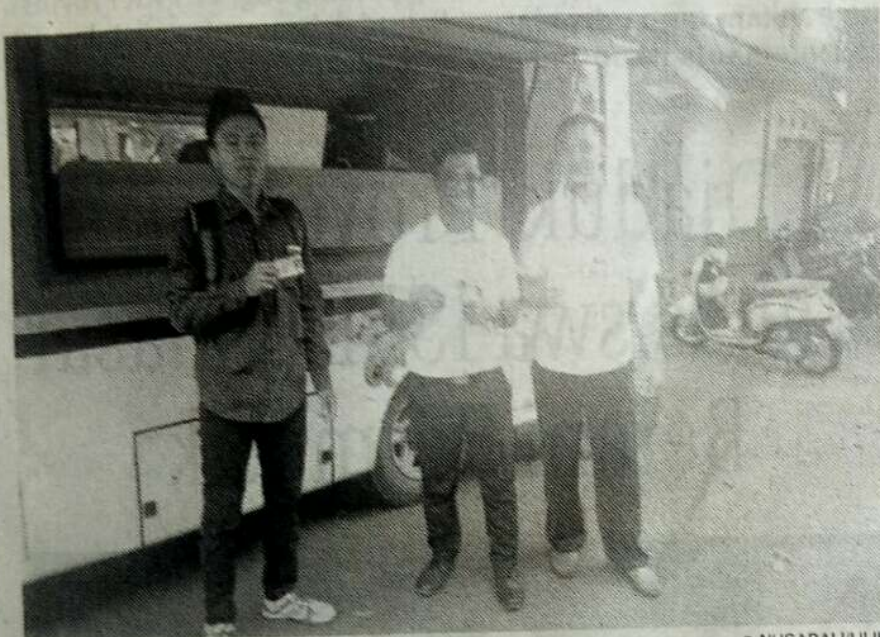
Di samping membuat sertifikat, PT Pinang Propertindo juga memberikan keleluasaan bagi warga setempat untuk mengolah lahan seluas 370 hektare. Hasil dari tanaman sebagian juga diserahkan kepada adat. "Warga kami juga diberikan mengolah lahan itu. Warga berkewajiban menyertorkan sebagian hasilnya ke adat. Cuma, lahan itu bisa ditanami ketika musim hujan. Kalau musim kemarau, lahannya kering," imbuhnya. **k19**

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *e-KTP*

Si Melik Perekaman e-KTP di Kampus

★ Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula



• NUSABALI/LILIK

Perekaman e-KTP jemput bola ke kampus Undiksha sukseskan keterlibatan pemilih pemula dalam Pileg 2019 oleh Disdukcapil Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng melalui program inovasinya Si Melik (Siap Melayani Identitas Kependudukan) jemput bola perekaman e-KTP ke Kampus Undiksha, Rabu (13/3) kemarin. Perekaman e-KTP jemput bola itu merupakan upaya Disdukcapil Buleleng mendukung kesuksesan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Sekretaris Disdukcapil Buleleng, Dewa Made Mudita menjelaskan program Si Melik Disdukcapil Buleleng, sesuai dengan edaran dari Kement-

rian Dalam Negeri, menjelang Pileg tanggal 17 April 2019 mendatang. Meski demikian Disdukcapil Buleleng sebelumnya juga sudah bergerak untuk melakukan perekaman e-KTP pada pemilih pemula dengan menyasar SMA/SMK se-Kabupaten Buleleng.

"Untuk pemilih pemula ini memang sangat dinamis dan tak pernah habis, karena setiap hari ada saja umur seseorang bertambah, jadi hari ini kami maksimalkan menyasar yang belum melakukan perekaman," kata Mudita. Selain itu pihaknya juga mengaku menggenjot perekaman jemput bola ke desa-desa

dan sejumlah tempat umum.

Ia juga menjelaskan jika pelayanan jemput bola perekaman e-KTP ke kampus-kampus itu akan berlangsung hingga tanggal 17 Maret mendatang. Sedangkan pada hari pertama perekaman e-KTP di kampus Undiksha yang dimulai sejak pukul 09.00-14.00 WITA terlihat lengang. Sejak mobil keliling Disdukcapil diparkir di areal kampus Undiksha, hanya dua orang mahasiswa yang melakukan perekaman dan lima orang lainnya melakukan pencetakan e-KTP.

"Hari ini sedikit yang melakukan perekaman, tetapi ini menunjukkan bahwa mereka sudah hampir semua memiliki e-KTP, dengan sejumlah program yang terus kami genjot. Apalagi syarat masuk perguruan tinggi juga salah satunya menggunakan e-KTP, jadi mereka yang sudah cukup umur sudah melakukan perekaman jauh-jauh hari," jelas dia.

Sementara itu dari 11.651 orang pemilih pemula yang sudah dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pileg 17 April mendatang, Mudita belum dapat menyampaikan data pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal itu disebabkan perkembangan dan pergerakan data kependudukan disebut sangat dinamis. **k23**

Nama Media : Nusa Bali

Kategori : P3K

Goal Kelulusan Pegawai dengan Perjanjian Kerja

Tunggu Kesiapan Alokasi Gaji

Pengumuman seleksi P3K masih 'digantung' lantaran pemerintah pusat masih memastikan adanya alokasi dana gaji oleh pemerintah daerah.

SINGARAJA, NusaBali

Alasan pemerintah pusat belum mengumumkan kelulusan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), mulai terjawab. Pemerintah pusat ingin memastikan kesiapan daerah menyediakan dana bagi P3K. Karena gaji dan tunjangan lainnya bagi P3K itu, ditanggung sepenuhnya oleh

daerah melalui APBD.

Di Buleleng sendiri, seleksi P3K melalui sistem Computer Assited Test (CAT) diikuti oleh 126 peserta, pada tanggal 23 Februari 2019 lalu. Sehari setelah tes, nilai masing-masing peserta sudah diumumkan. Hanya saja, berapa peserta yang lulus dan tidak lulus dalam seleksi tersebut, sampai sekarang belum juga diumumkan.

Informasinya, kelulusan peserta P3K sen-gaja ditunda oleh pemerintah pusat, sebelum ada kepastian dari Pemkab Buleleng mengalokasikan dana untuk gaji dan tunjangan bagi P3K. Kabarnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melayangkan surat meminta kesiapan dana tersebut pada Pemkab Buleleng.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-

banan SDM (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa Rabu (13/3) mengakui ada surat dari Kemenpan RB terkait dengan kesiapan dana bagi P3K yang dinyatakan lulus nanti. Wisnawa mengaku, surat tersebut sudah dibalas, dimana Pemkab Buleleng siap mengalokasikan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. "Kami belum tahu kapan pastinya kelulusan P3K disampaikan, tapi ada kabar kalau pusat masih menunggu kesiapan masing-masing daerah mengalokasikan anggaran untuk gaji P3K yang akan diangkat. Kalau kami sudah menjawab kesiapan anggaran itu," katanya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, Bimantara menjelaskan, sesuai hasil koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKPSDM, alokasi anggaran gaji P3K baru bisa dialokasi-

kan pada APBD Perubahan 2019. Karena penerimaan P3K dari pusat disampaikan setelah APBD 2019 Induk disahkan. Hanya saja, besaran anggaran yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan nanti, belum ditentukan. Ini karena menunggu jumlah P3K yang dinyatakan lulus.

"Kami sudah menjawab surat Kemenpan RB, intinya Pemkab Buleleng siap dengan kebutuhan anggaran P3K. Sekarang kami tinggal menunggu berapa jumlah P3K yang diterima. Sehingga dari jumlah itu, kami bisa hitung kebutuhan anggarannya nanti," jelasnya.

Sebelumnya, pengumuman nilai hasil seleksi CAT, telah disampaikan BKPSDM Buleleng, merujuk pengumuman portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) <http://drive.google.com/file/d/1Na9wAwujq4agplaRXDSHG6X9G0Blo02/view?usp=sharing>. Melalui portal tersebut,

seluruh peserta yang ikut seleksi CAT dapat melihat nilai yang diperoleh.

Dari pengumuman itu, lebih dari 20 peserta nilainya berada di bawah ambang batas minimal. Dalam Permen PAN RB Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan, peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas minimal yang ditentukan untuk tes kompetensi dan tes wawancara. Untuk tes kompetensi, nilai kumulatif ambang batas minimal yaitu sebesar 65, dengan ketentuan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Apabila ambang batas untuk tes kompetensi tersebut telah terpenuhi, maka peserta harus memenuhi nilai ambang batas minimal untuk tes wawancara yaitu 15.

Dari puluhan peserta yang nilainya di bawah passing grade, sebagian besar adalah tenaga pendidik. Sedangkan tenaga penyuluh, hampir semuanya berada di atas passing grade, k19

Nama Media : Nusa Bali

Kategori : P3K

Soal Kelulusan Pegawai dengan Perjanjian Kerja

Tunggu Kesiapan Alokasi Gaji

Pengumuman seleksi P3K masih 'digantung' lantaran pemerintah pusat masih memastikan adanya alokasi dana gaji oleh pemerintah daerah.

SINGARAJA, NusaBali

Alasan pemerintah pusat belum mengumumkan kelulusan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), mulai terjawab. Pemerintah pusat ingin memastikan kesiapan daerah menyediakan dana bagi P3K. Karena gaji dan tunjangan lainnya bagi P3K itu, ditanggung sepenuhnya oleh

daerah melalui APBD.

Di Buleleng sendiri, seleksi P3K melalui sistem Computer Assited Test (CAT) diikuti oleh 126 peserta, pada tanggal 23 Februari 2019 lalu. Sehari setelah tes, nilai masing-masing peserta sudah diumumkan. Hanya saja, berapa peserta yang lulus dan tidak lulus dalam seleksi tersebut, sampai sekarang belum juga diumumkan.

Informasinya, kelulusan peserta P3K sen-gaja ditunda oleh pemerintah pusat, sebelum ada kepastian dari Pemkab Buleleng meng-alokasikan dana untuk gaji dan tunjangan bagi P3K. Kabarnya, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melayangkan surat meminta kesiapan dana tersebut pada Pemkab Buleleng.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-

banan SDM (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa Rabu (13/3) mengakui ada surat dari Kemenpan RB terkait dengan kesiapan dana bagi P3K yang dinyatakan lulus nanti. Wisnawa mengaku, surat tersebut sudah dibalas, dimana Pemkab Buleleng siap meng-alokasikan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. "Kami belum tahu kapan pastinya kelulusan P3K disampaikan, tapi ada kabar kalau pusat masih menunggu kesiapan masing-masing daerah mengalokasikan anggaran untuk gaji P3K yang akan diangkat. Kalau kami sudah menjawab kesiapan anggaran itu," katanya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, Bimantara menjelaskan, sesuai hasil koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKPSDM, alokasi anggaran gaji P3K baru bisa dialokasi-

kan pada APBD Perubahan 2019. Karena penerimaan P3K dari pusat disampaikan setelah APBD 2019 Induk disahkan. Hanya saja, besaran anggaran yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan nanti, belum ditentukan. Ini karena menunggu jumlah P3K yang dinyatakan lulus.

"Kami sudah menjawab surat Kemenpan RB, intinya Pemkab Buleleng siap dengan kebutuhan anggaran P3K. Sekarang kami tinggal menunggu berapa jumlah P3K yang diterima. Sehingga dari jumlah itu, kami bisa hitung kebutuhan anggarannya nanti," jelasnya.

Sebelumnya, pengumuman nilai hasil seleksi CAT, telah disampaikan BKPSDM Buleleng, mer-ujuk pengumuman portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) <http://drive.google.com/file/d/1Na9wAwujq4agplaRXDSHGgX9G0B1o02/view?usp=sharing>. Melalui portal tersebut,

seluruh peserta yang ikut seleksi CAT dapat melihat nilai yang diperoleh.

Dari pengumuman itu, lebih dari 20 peserta nilainya berada di bawah ambang batas minimal. Dalam Permen PAN RB Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan, peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas minimal yang ditentukan untuk tes kompetensi dan tes wawancara. Untuk tes kompetensi, nilai kumulatif ambang batas minimal yaitu sebesar 65, dengan ketentuan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Apabila ambang batas untuk tes kompetensi tersebut telah terpenuhi, maka peserta harus memenuhi nilai ambang batas minimal untuk tes wawancara yaitu 15.

Dari puluhan peserta yang nilainya di bawah *passing grade*, sebagian besar adalah tenaga pendidik. Sedangkan tenaga penyuluh, hampir semuanya berada di atas *passing grade*. k19

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Senderan*



• NUSABALI/LULIK

Senderan Tukad Buleleng sebelah selatan jembatan Gempol, Kelurahan Banyuning yang amblas dan menyeret tembok dapur dan kamar mandi warga.

Senderan Tukad Buleleng Jebol

★ Tembok Dapur dan Kamar Mandi Warga Banyuning Ikut Tergerus

SINGARAJA, NusaBali

Senderan sepanjang 10 meter dan tinggi 15 meter di aliran Tukad Buleleng, tepatnya di sebelah Selatan Jembatan Gempol Banyuning, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, bagian sisi Timur Jebol. Tembok dapur dan kamar mandi Made Tirtayasa, 59, yang tinggal di sana juga ikut tergerus terbawa derasny arus air sungai.

Menurut korban, Tirtayasa, bencana jebolnya senderan tukad Buleleng yang berlokasi tepat di sebelah Selatan rumahnya terjadi pada saat Kamis (7/3) bertepatan dengan puncak Hari Raya Nyepi. Senderan itu jebol sekitar pukul 20.00 WITA. Jebolnya senderan Tukad Buleleng itu diakibatkan

besarnya debit air sungai pasca hujan deras mengguyur dua malam. Bahkan debit air sungai disebut naik sekitar tiga meter dari kondisi biasanya.

Tirtayasa dan istrinya Ketut Pinarti, 67, saat itu mengaku sedang berada di ruang tengah. Tiba-tiba saja mereka merasakan rumahnya bergetar dan seketika tembok dapur dan kamar mandi beserta sejumlah peralatan memasak ikut tertarik ke bawah dan jebol. "Tembok dapur dan kamar mandinya tergerus karena senderan disampingnya amblas. Waktu itu memang aliran air sungainya besar sekali, pas hujan deras juga saat Nyepi itu, rasanya rumah ini bergetar karena saking

derasnya," ujar Tirtayasa yang ditemui di rumahnya Rabu (13/3) siang kemarin.

Pasutri itu kini tak berani tidur di kamar yang bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi yang temboknya sudah jebol. "Lantai sama tembok kamar juga sudah retak-retak jadi tidak berani tidur di kamar, sementara di ruang tengah dulu," katanya.

Tirtayasa dan istrinya pun mengaku belum memiliki rencana untuk mengungsi sementara ke rumah keluarga, sebab hanya rumah sederhana itu yang mereka miliki satu-satunya.

Sementara itu dengan bencana itu Tirtayasa mengkhawatirkan jebol susulan kembali ter-

jadi saat hujan deras dan debit air sungai meningkat. Bahkan ia pun mengkhawatirkan rumahnya ikut tergerus saat hal itu terjadi. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Suadnyana mengaku belum menerima laporan jebolnya senderan tukad Buleleng meski sudah terjadi hampir seminggu.

"Sampai saat ini belum ada laporan yang di Tukad Buleleng, coba besok pagi kami cek ke lapangan," kata Suadnyana. Pihaknya pun mengaku setelah meninjau lokasi bencana akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, mengingat bencana itu ada di daliran sungai. **k23**

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Kebakaran*

Ditinggal ke Tetangga, Rumah Hangus Terbakar

SINGARAJA, NusaBali

Warga RT 1, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Rabu (13/3) sekitar pukul 11.00 WITA dikagetkan dengan peristiwa kebakaran rumah Fauzan Ali, 40. Warga dan pemuda sekitar pun panik dan langsung bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum Pemadam Kebakaran tiba di tempat. Diduga peristiwa kebakaran itu terjadi karena kompor yang meledak, saat ditinggalkan ke rumah tetangga dalam keadaan menyala.

Peristiwa yang melalap habis isi rumah Fauzan Ali itu bermula sekitar pukul 09.30, Sumiati, 48, tetangga depan rumah korban mencium bau hangus. Ia pun mengaku beberapa kali keluar masuk rumahnya dan menggerutu ada bau hangus tetapi tak ada tetangganya yang menghiraukan. Ia pun tak mengetahui darimana asal bau hangus yang tercium olehnya.

Sedangkan di rumah korban saat itu, diterangkan Sumiati ada Mariana, 40, istri Fauzan Ali dan anak ketiganya, Najib, 5, bermain di teras. Sedangkan korban Fauzan Ali yang seorang



• NUSABALI/LILIK

Warga Kelurahan Kampung Bugis, membantu proses evakuasi barang-barang korban kebakaran setelah api berhasil dipadamkan, Rabu (13/3) siang kemarin.

guru masih berada di Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, tempat mengajarnya. Saat kejadian itu, Mariana sedang berada di rumah tetangganya dan membiarkan rumah dalam keadaan terbuka dan kompor masih menyala.

"Saya kira awalnya nasi yang gosong, saya mondar-mandir sendiri kaya orang gila bilang hangus-hangus, tapi tidak ada yang respons, saya juga tidak tahu darimana asal baunya. Selang beberapa lama sekitar pukul 10.30 kedengaran

sesuatu meledak dan terakhir api sudah membesar di atap rumahnya," tutur Sumiati yang ditemui di lokasi kejadian dengan menggendong bayi.

Sumiati pun kemudian berteriak kebakaran dan langsung mengundang warga sekampung. Beruntung pemuda dan warga setempat cepat sigap membantu memadamkan api. Sehingga api tak sempat merembet ke rumah lainnya meski posisinya cukup padat dan menempel satu sama lain. Api kemudian dituntaskan oleh

pemadam kebakaran yang tiba beberapa menit kemudian, pasca mendapat laporan.

Sementara itu Kapolsek Kota Singaraja, Kopol AA Wiranata Kusuma menjelaskan dari hasil pemeriksaan saksi korban dan sejumlah saksi dilapangan, peristiwa kebakaran itu disebabkan karena ledakan kompor yang ditinggal korban masih dalam keadaan menyala. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 70 juta, karena mengalami kerusakan rumah bagian atap dan hangusnya barang seisi rumah.

"Jadi sebelum kejadian istri korban pergi ke tetangga membiarkan kompornya dalam keadaan hidup. Saat itu katanya sedang memasak wortel, karena gosong akhirnya kompor meledak dan memicu kebakaran," ungkap mantan Kapolsek Seririt itu.

Istri korban yang datang dari rumah tetangga mendapati rumahnya terbakar masih dalam keadaan shock. Polsek Kota Singaraja pun langsung memberikan bantuan sembako sebagai wujud kepedulian kepada korban bencana. **k23**

a Media : Nusa Bali

Kategori : Hari raya

Puluhan Ogoh-Ogoh Tak Dipralina

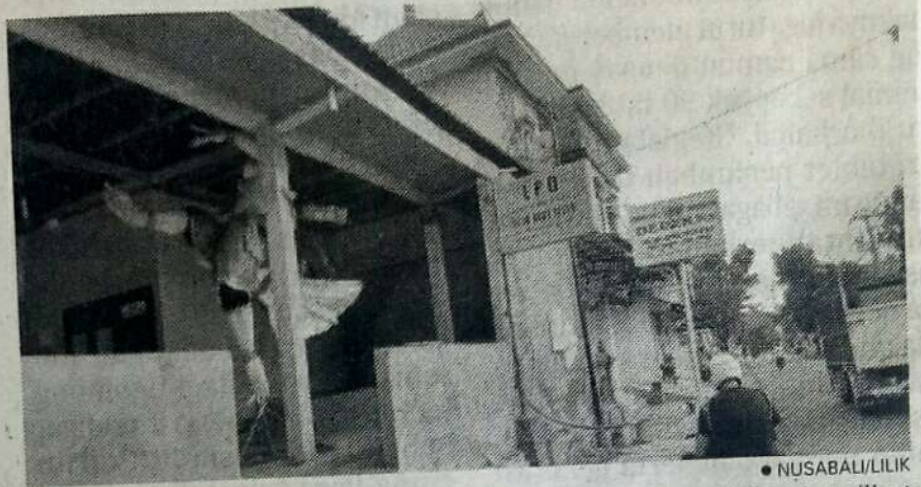
★ MMDP Segera Lakukan Evaluasi

SINGARAJA, NusaBali

Sepekan pasca Hari Raya Nyepi tahun baru saka 1941, sejumlah ogoh-ogoh masih berdiri kokoh. Puluhan ogoh-ogoh itu tidak dipralina sesuai dengan fungsinya. Ogoh-ogoh yang masih dipertahankan oleh sekaa truna dan kelompok pemuda yang membuatnya malah masih disimpan di sejumlah balai banjar dan pinggir jalan.

Ogoh-ogoh yang dipralina itu pun masih tampak ramai di sejumlah sudut wilayah kota hingga ke pinggir desa di Kabupaten Buleleng. Keberadaan ogoh-ogoh yang belum dipralina tersebut akhirnya memakan tempat yang cukup banyak yang dapat mengganggu pemandangan dan fasilitas umum lainnya.

Ketua Majelis Madya (MMDP) Buleleng, Dewa Putu Budarsa dikonfirmasi Rabu (13/3) kemarin tidak menampik hal tersebut. Ia pun mengakui sejumlah ogoh-ogoh masih dipertahankan oleh pembuatnya dan tidak dipralina usai pengarakan saat pangrupukan Rabu (6/3) lalu. Padahal setiap tahunnya pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh desa pakraman yang ada agar melaksanakan rangkaian Nyepi dengan ketentuan yang ada. Termasuk ketentuan pembuatan, pengarakan hingga



• NUSABALI/LILIK

Ogoh-ogoh yang masih bertahan dan tidak dipralina usai Nyepi, terlihat di sejumlah wilayah Buleleng, Senin (13/3).

pralina ogoh-ogoh.

"Dari tahun ke tahun ini yang memang selalu menjadi kendala usai nyepi. Kami kembali akan berikan imbauan kepada masing-masing desa pakraman untuk menindak lanjuti ogoh-ogoh yang tidak dipralina," ungkap dia.

Menurutnya pembuatan ogoh-ogoh sebagai kreativitas pemuda Hindu dalam menyambut tahun baru Saka melalui ogoh-ogoh sangat baik. Apalagi pada hakekatnya ogoh-ogoh menyimbolkan buta kala. "Kadang memang sekaa atau pemuda yang membuatnya sayang untuk membakar karena masih bagus dilihat dan biaya pembuatannya mahal," imbuh Budarsa.

Buta Kala yang diwujudkan

dalam ogoh-ogoh sudah sepatutnya untuk dipralina serangkaian dengan pangrupukan dna pacaruan untuk nyomia butha kala. Budarsa pun mengatakan jika tidak dibakar selain dapat menghambat kegiatan umum karena disimpan di balai banjar, juga bisa mendatangkan kemalangan dari segi niskala.

"Kalau simbol buta ini dibiarkan dalam artian tidak disomia, bisa-bisa dimasuki roh-roh yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu ogoh-ogoh memang harus dipralina," imbuh dia. Pihaknya pun berharap kepada seluruh desa pakraman dan pemuda yang masih mempertahankan ogoh-ogohnya sampai saat ini untuk segera menindaklanjuti hal tersebut untuk kebaikan bersama. k23